Tanda-Tanda Keruntuhan Ekonomi Indonesia

Jasmine Pradina Mutiara Insani, Kanaya Diar Pratista, Kayana Putri Adzhani, Muhammad Basel Fawaz Sigit, Wildan Darmawan Nudawiluha.

Opini Dalam Negeri#1
Departemen Analisis Isu Strategis
BEM KM UGM 2025 Kabinet Transformasi

Intisari

Di tengah euforia "Indonesia Emas 2045" kajian ini akan mengungkap rapuhnya fondasi ekonomi Indonesia. Bukannya kemajuan, negara justru menunjukkan gejala kegagalan struktural. Kajian ini bertujuan menganalisis tanda-tanda keruntuhan ekonomi Indonesia melalui lensa teori *failed state* dan *rentier state*, serta menawarkan solusi pembangunan endogen untuk mengatasi krisis. Integrasi analisis kuantitatif (regresi kemiskinan) dengan kerangka *failed-rentier state*, mengungkap kontradiksi pembangunan ekstraktif dan ketimpangan fiskal secara mendalam. Penerimaan pajak merosot, IHSG anjlok 19,48%, dan laporan APBN tertutup, menandakan krisis fiskal dan legitimasi. Ketergantungan komoditas, korupsi sistemik, dan marginalisasi sektor informal memperparah ketimpangan Indonesia menuju *failed-rentier state*, dengan kebijakan yang pro-elit dan anti-rakyat. Pembangunan endogen, berfokus pada kemandirian dan keadilan, adalah solusi realistis. Tanpa reformasi radikal, Indonesia akan terjebak dalam delegitimasi dan kehancuran ekonomi.

Kata kunci: Ketimpangan, Fiskal, *Rentier State*, *Failed State*, Pembangunan Endogen

A. Pendahuluan

Indonesia hari ini sedang disuguhkan optimisme besar bahwa bangsa ini akan mencapai generasi emas pada tahun 2045. Tak tanggung-tanggung, cita-cita besar ini bahkan termaktub dalam visi dan misi Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto. Dalam *Asta Cita*[1]-nya, beliau merincikan setidaknya ada delapan misi yang akan dikerjakan untuk mencapai sebuah visi besar yang disebut “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

[1] Asta Cita adalah delapan program prioritas Prabowo Subianto sebagai Presiden RI yang dirancang untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Berbicara mengenai indikator kemajuan sebuah bangsa, tentu tak akan lepas dari aspek sosial-ekonomi. Menurut Rolip Saptamaji (2011) dalam kajiannya yang berjudul *Indonesia: Jalan Menuju Negara Gagal*, tolok ukur keberhasilan dan kegagalan sebuah negara dapat dilihat dari upaya distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Jika kita kerucutkan pada perspektif ekonomi, kerentanan sebuah negara umumnya terlihat dari berlangsungnya stagnasi yang berkepanjangan dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Hal tersebut dapat diperparah jika disertai dengan adanya kesenjangan yang signifikan antara elit dan rakyat dalam hal kesejahteraan, kekayaan, kepemilikan tanah, dan akses terhadap faktor-faktor produksi (Saptamaji, 2011).

Berangkat dari uraian di atas, tampaknya sebagian indikator yang disebutkan kini tengah dialami oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan "Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta" (APBN *KiTa*) edisi Februari 2025 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang sempat dapat diunduh, diketahui bahwa pendapatan negara tercatat sebesar Rp316,9 triliun, atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya—meskipun tidak setajam kontraksi yang terjadi pada sisi perpajakan (Silfia, 2025). Penerimaan pajak, yang merupakan tulang punggung utama pendanaan negara, tercatat mengalami penurunan tajam sebesar 30,19% secara tahunan (*year-on-year*), yaitu dari Rp269,02 triliun pada Februari 2024 menjadi Rp187,8 triliun pada Februari 2025 (KumparanBISNIS, 2025). Di sisi lain, belanja negara meningkat mencapai Rp348,1 triliun, yang mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp31,2 triliun—berbalik dari posisi surplus Rp26 triliun pada Februari 2024 (Kamalina, 2025). Hal ini menjadi catatan serius, mengingat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kesehatan fiskal suatu negara.

Persoalan perihal laporan realisasi APBN tidak berhenti hanya di tataran analisis data dan tren angka saja. Laporan realisasi "APBN KiTa" menunjukkan kemunduran transparansi dibanding tahun 2024. Hilangnya transparansi ini tercermin dari belum diunggahnya, penghapusan, dan keterlambatan laporan APBN KiTa di tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh data pelaksanaan APBN yang masih belum stabil akibat berbagai faktor (DDTCNews, 2025). Sementara itu, Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menduga keterlambatan ini terkait kendala teknis dalam penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) (Tempo, 2025).

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)—sebagai indikator penting dalam menilai persepsi investor dan stabilitas ekonomi makro—mengalami penurunan sebesar 19,48% dalam kurun lima bulan sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. IHSG yang kokoh bertengger di angka 7.772,60 pada 20 Oktober 2024 ambrol menjadi 6.258,18 per Maret 2025 (Rafsanjani & Rosdiana, 2025). Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan ekonomi dan politik pemerintah. Menurut Prof. Didik J. Rachbini, Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Rektor Universitas Paramadina, penurunan tajam ini bukan sekadar fluktuasi pasar biasa, melainkan sinyal dari menurunnya kepercayaan pelaku pasar terhadap arah kebijakan pemerintah (Bukamata News, 2025). Salah satu kebijakan yang turut memicu gejolak pasar adalah pembentukan Danantara[2] yang disahkan secara kilat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selepas disahkan, terjadi penarikan dana asing hingga Rp24 triliun hanya dalam waktu singkat, termasuk Rp3,47 triliun dalam satu hari (Bukamata News, 2025). Dalam logika pasar modal, penurunan IHSG yang drastis merupakan indikasi ekspektasi negatif terhadap stabilitas politik-ekonomi serta efektivitas pengelolaan fiskal negara.

Satu hal lain yang menjadi tanda tanya besar adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur Kebijakan Efisiensi Anggaran Negara. Menurut Prabowo, untuk mengantisipasi tekanan fiskal, pemerintah menerapkan kebijakan pemangkasan belanja negara (efisiensi anggaran) sebesar Rp306,7 triliun. Kementerian Keuangan kemudian merincikan bahwa potensi efisiensi nyata yang dapat dilakukan hanya sekitar Rp256 triliun dari kementerian/lembaga, serta Rp50 triliun dari transfer ke daerah (Reuters, 2025). Meskipun pada dasarnya niat untuk melakukan efisiensi merupakan langkah yang baik, kebijakan ini menjadi kontroversial karena banyak sektor penting justru mengalami pemangkasan anggaran, termasuk sektor pendidikan. Alih-alih mengalokasikan dana pada sektor-sektor fundamental yang menjadi penopang pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia, pemerintah justru mempertebal alokasi pada program-program yang dinilai kurang mendesak, seperti Danantara, Makan Bergizi Gratis, atau melanjutkan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN).

Jika hal-hal di atas terus dibiarkan, maka keemasan yang didambakan Indonesia pada 2045 rasa-rasanya hanya akan berujung kecemasan. Bahkan bukan tidak mungkin jika pola ekonomi seperti ini terus dilanjutkan, Indonesia akan

---

[2] Danantara adalah BUMN baru yang dibentuk sebagai super holding keuangan untuk mengelola dana abadi dan investasi strategis negara.

menjadi negara yang gagal dan kolaps atau bangkrut. Hal ini sejalan dengan teori *failed state*[3] yang diperkenalkan oleh akademisi Amerika Serikat, Robert I. Rotberg. Melalui karyanya yang berjudul *Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators*, Rotberg (2003) menjelaskan bahwa:

> "Negara lemah mencakup rangkaian negara yang luas yang: secara inheren lemah karena kendala geografis, fisik, atau ekonomi fundamental; pada dasarnya kuat, tetapi lemah sementara atau situasional karena pertentangan internal, kelemahan manajemen, keserakahan, despotisme, atau serangan eksternal; dan campuran keduanya" (p. 4).

Dalam konteks ini, kegagalan ekonomi bukan hanya soal angka statistik, melainkan merupakan refleksi dari keruntuhan kapasitas negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (Rotberg, 2003). Berdasarkan uraian di atas, kajian ini, bertujuan untuk mengkaji apakah Indonesia termasuk *failed state* dan *rentier state*. Untuk menjawab rumusan masalah, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

B. Ketika Negara Gagal

Konsep *failed state* atau negara gagal telah berkembang luas dalam literatur dengan berbagai definisi dan kategori. Beragam definisi dan kategori terjadi karena negara gagal bersifat multidimensional yang mencakup: hukum, keamanan, pertumbuhan ekonomi, representasi politik, distribusi pendapatan, dan sebagainya. Teori *failed state* lebih sering diasosiasikan dengan kegagalan politik dan hukum. Menurut Daniel Thurer (1999), *failed state* sering dikaitkan dengan pemerintah yang tidak mampu dalam menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum, ketertiban negara, menjaga stabilitas, serta berperan dalam tatanan internasional. Noam Chomsky (2006) berpendapat bahwa negara gagal adalah negara yang tidak mampu atau tidak mau melindungi warga negaranya dari kekerasan dan kehancuran, menjamin hak-hak mereka di dalam maupun di luar negeri, serta mempertahankan institusi demokrasi yang berfungsi secara substansial. Daniel Thurer dan Noam Chomsky menekankan konsep *failed state* dari sudut pandang politik dan hukum.

---

[3] Failed state adalah negara yang gagal menjalankan fungsi dasar pemerintahan dan melindungi rakyatnya.

Namun, sudut pandang ekonomi juga memiliki peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas suatu negara. Negara yang tidak dapat mengelola perekonomian dengan baik akan menghancurkan pondasi negara, menciptakan ketidakstabilan, dan berujung pada kegagalan negara. Menurut Robert Rotberg (2003), Kegagalan negara dapat ditandai dengan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dasar, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Hal tersebut mengakibatkan penurunan drastis pada indikator ekonomi seperti GDP per kapita, peningkatan inflasi, dan meluasnya korupsi. Negara gagal juga sering kehilangan kendali atas sebagian wilayahnya sehingga kegiatan ekonomi di daerah tersebut tidak lagi tunduk pada hukum dan regulasi formal. Hal ini menyebabkan munculnya ekonomi bayangan[4] dan meningkatnya kriminalitas. Akibatnya, negara kehilangan sumber pendapatan penting dari pajak yang kemudian memperdalam masalah kegagalan ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam kasus yang terjadi di Zimbabwe, kehancuran ekonomi menjadi pemicu awal dari keruntuhan suatu negara. Menurut Robert Rotberg (2003), Zimbabwe pada tahun 2001–2002 menunjukkan gejala awal negara menuju failed state, ditandai dengan penurunan drastis pendapatan nasional dan standar hidup masyarakat. Zimbabwe mengalami penurunan tajam Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita hingga 10% per tahun, inflasi melonjak dari 30% menjadi 116%, dan nilai tukar mata uang lokal anjlok dari 38:1 menjadi 500:1 terhadap dolar AS (Rotberg, 2003). Investasi asing dan domestik mengering, pengangguran melonjak, dan layanan kesehatan serta pendidikan runtuh. Tingkat infeksi HIV meningkat tajam, sementara kelaparan dan kekurangan bahan pokok menjadi ancaman nyata, diperparah oleh bencana iklim dan kelangkaan valuta asing. Selain itu, runtuhnya supremasi hukum, disfungsi lembaga politik, penindasan oposisi, korupsi, dan kecurangan pemilu menghilangkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kemerosotan ekonomi yang pesat, hilangnya legitimasi pemerintah, dan praktik penyalahgunaan kekuasaan di Zimbabwe menjadi indikator terjadinya negara gagal.

Dari kasus di Zimbabwe tersebut, ketidakstabilan ekonomi bukan hanya merupakan dampak dari kegagalan suatu negara, melainkan juga dapat menjadi faktor utama yang memicu keruntuhan suatu negara. Pendekatan dimensi ekonomi dapat menjadi indikator dari terjadinya negara gagal. Dengan demikian, teori *failed state* dalam dimensi ekonomi adalah kegagalan negara menjaga stabilitas ekonomi,

---

[4] Merujuk pada International Monetary Fund, ekonomi bayangan adalah kegiatan ekonomi yang ilegal dan tidak dilaporkan kepada otoritas resmi karena alasan moneter.

kepastian hukum, dan menyediakan infrastruktur dasar yang menjadi pondasi utama bagi pertumbuhan, keberlanjutan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Literatur mengenai negara gagal menekankan bahwa terdapat indikator tertentu yang harus dipenuhi untuk mengidentifikasi suatu negara sebagai "gagal" (DI John, 2008). Salah satu faktor utama yang sering muncul dalam berbagai definisi adalah ketidakmampuan negara dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Negara-bangsa yang mengalami kegagalan, tidak lagi mampu memberikan manfaat politik yang positif kepada rakyatnya, seperti keamanan dan stabilitas ekonomi. Pemerintah akan kehilangan legitimasi rakyatnya sehingga keberadaan negara tersebut tidak layak untuk dihormati dan tidak lagi dianggap sah.

Dalam perspektif ekonomi, *failed state* atau negara gagal adalah kondisi negara yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi ekonominya secara efektif sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Negara gagal dapat ditandai dengan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, menjaga stabilitas ekonomi, penegakan hukum, dan menyediakan layanan publik yang mendasar. Menurut Robert Rotberg (2003), negara gagal tidak lagi dapat memberikan barang politik positif kepada warga negaranya, yang mencakup stabilitas ekonomi, kepastian hukum, dan peluang ekonomi.

Salah satu ciri-ciri utama negara gagal adalah pemerintah yang kehilangan legitimasi publik (Rotberg, 2003). Ketika terjadi korupsi dan pemerintah tidak mampu merespons kebutuhan masyarakat secara memadai akan berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi. Alokasi sumber daya menjadi tidak efisien karena kebijakan tidak berdasarkan kepentingan publik tetapi dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kepentingan kelompok tertentu. Hal tersebut akan menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Negara dengan kasus korupsi yang tinggi akan mengalami minimnya investasi asing. Isu korupsi yang tinggi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menurunkan efisiensi dalam pengelolaan ekonomi, serta memperlemah legitimasi pemerintahan.

Negara gagal adalah negara yang kehilangan kendali atas wilayah teritorialnya (Di John, 2008). Ketidakmampuan suatu negara dalam memungut dan mengelola pajak dengan baik di wilayahnya akan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi. Kurangnya pendapatan dari sektor pajak menghambat pemerintah dalam membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi serta menarik investasi. Contohnya, di beberapa daerah terpencil mengalami keterbatasan akses jalan dan kurangnya jaringan komunikasi menunjukkan kendali atas wilayah yang

lemah sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Meskipun pemerintah pusat memegang kendali atas wilayah teritorialnya, implementasi kebijakan dan penegakan hukum sering mengalami hambatan di daerah-daerah terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan.

Jonathan Di John (2008) menyatakan bahwa penurunan ekonomi yang signifikan merupakan ciri lain dari negara gagal. Penurunan signifikan dalam ekonomi akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, seperti menurunnya pendapatan per kapita, peningkatan angka kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, dan inflasi. Kondisi ekonomi yang memburuk menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Ketidakpuasan masyarakat akibat tekanan ekonomi dapat memicu gejolak sosial, seperti peningkatan kriminalitas dan kerusuhan. Ketidakstabilan tersebut akan memperburuk kondisi ekonomi negara.

Robert Rotberg (2003) dan Jonathan Di John (2008) juga berpendapat bahwa tingginya tingkat korupsi juga dapat menjadi ciri negara gagal. Korupsi bukan hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, melainkan juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat masuknya investasi asing. Investor asing cenderung menghindari menanamkan modalnya di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi karena memiliki risiko yang tinggi. Selain itu, korupsi juga melemahkan institusi-institusi negara dan menimbulkan ketimpangan sosial.

a. Kebijakan Makroekonomi

Meskipun makroekonomi Indonesia menampilkan angka pertumbuhan yang impresif, realitas di lapangan menunjukkan kontras yang tajam. Pada 2023, pertumbuhan PDB mencapai 5,0%, tetapi 25,9 juta orang (9,36% penduduk) masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional per Maret 2023, setara 9,36% dari total populasi (World Bank: BPS, 2023). Sementara itu, upah rata-rata pekerja formal hanya sekitar Rp3,18 juta per bulan, atau setara USD 227,14, yang sulit menutupi kebutuhan dasar keluarga (Mulya, 2024). Di sisi lain, kenaikan upah riil stagnan meski inflasi tercatat 3,7% pada 2023, kenaikan upah riil buruh hanya 0,7% per tahun (Siahaan, 2024).

Kesenjangan distribusi pendapatan semakin memprihatinkan. Rasio gini Indonesia pada Maret 2023 berada di 0,388, level yang menurut standar Bank Dunia menunjukkan ketimpangan tinggi (BPS, 2023). Lebih jauh lagi, 10 % penduduk terkaya menguasai hampir separuh total pendapatan nasional, sedangkan 50 % terbawah berjuang untuk merebut kurang dari 20 % dari kue ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan yang tinggi ternyata hanya

menguntungkan segelintir elit ekonomi dan politik, sementara mayoritas rakyat hanya menjadi saksi bisu.

Ironisnya, kebijakan yang digembar-gemborkan sebagai efisiensi fiskal justru memperlebar jurang ketimpangan. Pemangkasan subsidi BBM pada 2015 dan lonjakan harga Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter pada September 2022 menambah beban hidup rakyat (Akhmad dkk., 2023). Namun skema kompensasi sosial belum menyentuh mayoritas golongan rentan (Abimanyu & Imansyah, 2023). Di sisi lain, insentif pajak bagi korporasi besar terus melipatgandakan keuntungan investor sementara rasio pajak terhadap PDB Indonesia hanya 12,6%, tergolong terendah di G20, dan sistem pajak itu digambarkan sebagai "keju penuh lubang" oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (Tampubolon, 2012). Artinya, alih-alih memperkuat *social safety net*, kebijakan justru menciptakan ruang keuntungan lebih besar bagi mereka yang sudah kaya.

Sementara itu, struktur ekspor Indonesia tetap berorientasi pada komoditas primer tanpa nilai tambah. Pada 2023, batubara menyumbang 13,3 % dari total ekspor, dan kelapa sawit menyumbang 8,76 %, menegaskan posisi Indonesia sebagai "penyuplai bahan baku" ketimbang pusat manufaktur berdaya saing (TrendEconomy, 2023). Dengan pola ini, *added value chain* global tidak pernah berpihak pada Indonesia, rakyat kecil terus terpinggirkan, sementara elit menikmati "bonus" pertumbuhan.

b. Kebijakan Fiskal

Dalam membentuk kebijakan fiskal, pemerintah condong mengutamakan stabilitas fiskal nominal dibanding pemerataan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini terlihat pada kebijakan pemotongan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah Indonesia pertama kali memotong subsidi BBM dalam *fuel price reform* Januari 2015, menaikkan harga Pertamax dan Solar serta mendorong inflasi dari 4,4% menjadi 5,0% meski tujuan utamanya adalah meredam beban anggaran (Casier, L. & Beaton, C., 2015). Namun kebijakan tersebut tidak diiringi dengan skema kompensasi sosial yang memadai: subsidi dialihkan kepada skema bantuan tunai bersyarat yang cakupannya menurun drastis.

Kebijakan ini kontra dengan studi SMERU Research Institute menegaskan bahwa pemangkasan subsidi BBM justru lebih menguntungkan kelompok kaya, sementara rumah tangga miskin menghadapi kenaikan harga hidup tanpa perlindungan nyata (Izzati dkk., 2023). Terus berlanjut, pada September 2022,

harga Pertalite BBM subsidi yang selama ini dinilai “ramah rakyat” dinaikkan dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, dan solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800, memukul daya beli masyarakat kecil sekalipun inflasi sepanjang 2022 berhasil ditekan di 5,5% berkat intervensi kebijakan lain (Lim, J., 2023).

Lebih jauh, pada tahun 2022 presiden menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang menyesuaikan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, serta memangkas kuota pupuk hingga 20% tanpa peningkatan alokasi anggaran kompensasi atau jaminan produktivitas petani. Padahal menurut laporan Jakarta Post (2023), pengurangan subsidi pupuk digulirkan bersamaan program bantuan langsung tunai upah yang cakupannya jauh lebih terbatas. Akibatnya, petani kecil yang sangat bergantung pada *input* murah terpaksa meminjam dengan bunga tinggi atau menurunkan dosis pemupukan, yang justru menurunkan hasil panen dan memperdalam kemiskinan agraria.

Secara teoritis, Musgrave & Musgrave (1989) menegaskan bahwa fungsi distribusi fiskal harus menyeimbangkan alokasi publik dengan keadilan sosial, kebijakan redistributif wajib mempersempit jurang kemiskinan, bukan memeliharanya. Implikasi distribusinya jelas: elit bisnis menapaki jalur kredit pajak, sementara rakyat kecil merogoh kocek lebih dalam untuk BBM dan pupuk. John Rawls (1971) dalam A *Theory of Justice* menegaskan konsep *difference principle*: ketimpangan sosial dan ekonomi hanya boleh dibenarkan apabila menguntungkan paling tidak beruntung di masyarakat. Namun, kebijakan rasionalisasi subsidi dan perluasan insentif justru menegasikan prinsip Rawls karena beban inflasi dan akses input murah secara eksklusif dipikul mereka yang paling rentan, sementara manfaat fiskal diarahkan untuk menjaga kenyamanan investor dan korporasi besar. Akibatnya, rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia tercatat rendah, hanya 11,6% pada 2022, jauh di bawah rerata negara berpendapatan menengah atas (World Bank, 2023).

Kesenjangan ini menandakan kegagalan fungsi distribusi APBN tidak mampu menjadi instrumen keadilan sosial, melainkan alat pelindung kepentingan modal besar. Dengan demikian, kebijakan fiskal Indonesia tidak pro-rakyat dan tidak pro-keadilan: subsidi dikorbankan demi disiplin anggaran, kompensasi sosial diterabas, dan insentif korporasi diperluas tanpa syarat redistributif. Bila pondasi redistribusi ini tetap retak, legitimasi negara di mata rakyat akan kian pudar,

mempercepat gejala *fragile state*. Ketimpangan dalam kebijakan fiskal hanyalah satu sisi dari kegagalan negara dalam menjamin keadilan sosial.

c. Pekerja Informal

Hampir enam dari sepuluh pekerja Indonesia berada di sektor informal. Data Badan Pusat Statistik (2023) mencatat 59,11 %, angkatan kerja sekitar 84,67 juta orang terjebak dalam pekerjaan tanpa jaminan sosial, perjanjian tertulis, atau akses ke tunjangan dasar seperti pensiun dan kecelakaan kerja. Walaupun kontribusi informal terhadap PDB lebih rendah daripada rata-rata Asia Timur, *output* ekonomi informal Indonesia tetap signifikan, sekitar 35 % dari total PDB sebelum tahun 2020 menurut model Multiple Indicators Multiple Causes Bank Dunia (World Bank, 2023). Menurut Dual-Sector Model Lewis (1954), ekonomi berkembang secara optimal jika surplus tenaga kerja di sektor tradisional (pertanian dan informal) dapat diserap oleh sektor industri modern. Namun di Indonesia, sektor formal gagal menyerap tenaga kerja sepenuhnya, sehingga informal menjadi "penyangga" permanen, bukan fase transisi temporer. Guy Standing (2011) menegaskan bahwa pekerja informal membentuk kelas prekariat yang hidup dari pendapatan harian tidak stabil dan terpapar risiko ganda: fluktuasi pendapatan dan ketiadaan jaminan sosial. Prekariat berada dalam kondisi "tidak bebas", bukan hanya dari kewajiban, tetapi juga dari hak dasar seperti cuti sakit dan pensiun.

Secara praktis, cakupan asuransi ketenagakerjaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia masih sangat terbatas, hanya < 26% pekerja formal yang tercakup, sementara pekerja informal sama sekali tidak memiliki akses ke skema ini. Adalagi, skema Jaminan Kesehatan Nasional membantu sebagian besar populasi (76%) melalui asuransi kesehatan universal, tetapi program ini tidak dirancang untuk mengakomodasi karakteristik kerja informal: iuran harus dibayar penuh oleh peserta, sehingga banyak yang enggan bergabung (ILO, 2023). Akibatnya, pekerja informal memikul beban ekonomi yang berat: tanpa cuti sakit resmi, tanpa tunjangan kecelakaan kerja, tanpa jaminan pensiun, mereka terpaksa terus bekerja meski dalam kondisi tidak layak. Global Wage Report ILO (2023) mencatat bahwa pekerja informal menanggung penurunan upah riil yang lebih tajam selama krisis, sebagai indikasi kerentanan struktural ekonomi informal. Tanpa integrasi dan proteksi yang setimpal, sektor informal akan tetap menjadi "mesin bertahan" yang terpinggirkan, bekerja demi eksistensi, bukan kesejahteraan. Lemahnya perlindungan terhadap pekerja

informal tidak bisa dilepaskan dari kerangka pembiayaan pembangunan yang sangat tergantung pada logika pasar global. Ketika negara lebih mengandalkan utang dan investasi asing, agenda pembangunan pun terseret mengikuti kepentingan eksternal, bukan kebutuhan domestik. Hal ini tampak jelas dalam pola pembiayaan Indonesia yang semakin menjauh dari prinsip kedaulatan ekonomi.

d. Ketergantungan pada Utang dan Investasi Asing

Meski pemerintah menegaskan manajemen utang yang "*prudent*", realitasnya adalah porsi utang publik terus menanjak dari 39,7% di 2022 ke 40,7% di 2021, sebelum bertengger di 38,7% pada Mei 2024 (APBNKiTa, 2024). Di luar itu, utang eksternal tumbuh untuk menutup defisit transaksi berjalan, dengan 30,4% dari PDB pada akhir 2024, sementara 84,8% bersifat jangka panjang, menambah beban jasa utang di masa depan. Di satu sisi, *Foreign Direct Investment* (FDI) menjadi tulang punggung pembiayaan investasi: pada 2023 tercatat USD 21,628 juta aliran masuk, menjadikan Indonesia peringkat kedelapan belas global (Stanbic Bank TradeClub, 2025).

Namun dari laporan ARC Group (2025), *share* FDI terhadap PDB hanya 1,6%, jauh di bawah rata-rata ASEAN (3—6%). Lebih parah lagi, 23,4% FDI masuk diarahkan ke industri logam dasar dan barang logam, sedangkan jika digabung dengan kimia, pertambangan, dan kertas, empat sektor primer lain mencapai 60,4 % total infus modal asing. Konsentrasi investasi ini memupus peluang transfer teknologi dan tumbuhnya rantai nilai domestik. Menurut Urata & Baek (2023), tidak ada *spillover* FDI tingkat nasional, kecuali kasus forward *spillover* pada klaster provinsi tertentu. Demikian pula, World Bank (2021) mencatat FDI Indonesia hanya sekitar 2 % dari PDB, lebih rendah dibandingkan Vietnam (6%) dan Kamboja (12%), menghambat akumulasi pengetahuan dan produktivitas.

Dalam perspektif *dependency theory*, negara seperti Indonesia terseret ke dalam pola *unequal exchange*: modal asing mengekstrak keuntungan terbesar, sedangkan input kasar dan sumber daya lokal dimanfaatkan tanpa penguatan industri dalam negeri (Frank, 1966; Dos Santos, 1970). Sementara Modernization Trap Escobar (1995) menggambarkan bagaimana narasi pembangunan global mendorong ekonomi terperangkap dalam logika eksternal yang bukan untuk kepentingan rakyat lokal. Dengan pola pendanaan yang tergantung pada utang dan investasi asing ekstraktif, Indonesia menangguhkan kedaulatannya atas kebijakan industri dan fiskal. Utang tinggi dan insentif FDI pro-ekstraksi

mempersempit ruang kebijakan pro-rakyat, memaksa negara berperan sebagai pelayan rente alih-alih pelindung warga. Tanpa reindustrialisasi berbasis nilai tambah, penguatan kapasitas teknologi domestik, dan restrukturisasi utang berkelanjutan, ekonomi Indonesia akan terus terjebak dalam siklus ketergantungan menjauh dari kedaulatan sejati. Rangkaian persoalan ini, dari ketimpangan fiskal, marginalisasi pekerja informal, hingga ketergantungan pada modal asing, mengarah pada satu kesimpulan utama: negara kehilangan daya dan arah untuk menjadi agen keadilan sosial.

e. Tingkat Korupsi

Dalam bidang hukum, penegakan keadilan mengalami kemunduran yang kasat mata, tetapi kerap dinegasikan oleh para penguasa. Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 (CNN, 2025). Ini memperlihatkan lemahnya persepsi publik terhadap integritas institusi penegak hukum. Korupsi tidak lagi terjadi secara sporadis[5], melainkan telah menjadi bagian dari sistem kekuasaan yang difungsikan sebagai alat transaksi antara negara dan pelaku bisnis besar. Kasus-kasus korupsi tidak berhenti pada aktor individu, melainkan menunjukkan bagaimana jalur hukum menjadi ajang kompromi politik (Hoesein, tanpa tahun).

Selain itu, selektivitas hukum kian terlihat dalam perlakuan negara terhadap korporasi besar dibandingkan masyarakat sipil. Supremasi hukum yang seharusnya menjadi tulang punggung demokrasi justru terkooptasi oleh kepentingan ekonomi-politik yang sempit. Ini bukanlah sekadar penyimpangan hukum, melainkan kegagalan struktural negara dalam menjaga prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (Siswanto, 2015).

f. Tingkat Kemiskinan

Krisis pembangunan Indonesia bukan sekadar soal salah urus teknis atau kelemahan kebijakan sektoral, melainkan akumulasi dari keputusan ekonomi-politik yang menegasikan mandat negara terhadap rakyat. Ketika anggaran diarahkan untuk melayani rente, pekerja informal dipinggirkan, dan utang serta FDI dijadikan pilar utama pembangunan, maka negara secara aktif sedang mencabut dirinya dari tanggung jawab sosialnya. Namun, sejauh mana negara benar-benar kehilangan kapasitas struktural untuk mengurangi

[5] Dalam konteks hukum di Indonesia, sporadis berarti kejadian, tindakan, atau penerapan hukum yang tidak teratur, jarang, dan tanpa pola berkesinambungan, seperti penegakan aturan yang tidak konsisten, jenis pelanggaran yang jarang terjadi, maupun upaya penegakan hukum yang insidental.

kemiskinan? Dalam konteks inilah, model regresi terhadap tingkat kemiskinan menjadi cermin yang tak bisa disangkal. Untuk ini digunakan model regresi seperti berikut:

```
Call:
lm(formula = Tingkat_Kemiskinan_Y ~ 0 + Rasio_Utang + CPI + Pertumbuhan_PDB +
    Ekspor_Komoditas_Utama, data = data)

Residuals:
        1         2         3         4         5         6
 0.023468 -0.085978  0.046765  0.014448 -0.004576  0.013159

Coefficients:
                       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Rasio_Utang             0.40368    0.02912  13.861  0.00516 **
CPI                    -0.12178    0.02517  -4.838  0.04016 *
Pertumbuhan_PDB        -0.61405    0.04319 -14.218  0.00491 **
Ekspor_Komoditas_Utama  1.73062    0.21335   8.111  0.01486 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.07257 on 2 degrees of freedom
Multiple R-squared:      1,     Adjusted R-squared:  0.9999
F-statistic: 2.526e+04 on 4 and 2 DF,  p-value: 3.959e-05
```

Gambar 1. Hasil Model Regresi Linear Berganda: Pengaruh Rasio Utang, CPI, Pertumbuhan PDB, dan Ekspor Komoditas terhadap Tingkat Kemiskinan
Sumber: (CNBC Indonesia, 2020; Okezone, 2020; Infobank, 2021; Swa, 2021; Worldbank, 2022; World's Top Exports, 2022; BPS, 2023; Tradeimex, 2023; ARC Group, 2024; Jakarta Globe, 2025; Cekindo, 2025)

Model regresi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu rasio utang, CPI (*Consumer Price Index*), pertumbuhan PDB, dan ekspor komoditas utama. Berdasarkan data dari hasil model regresi menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio utang dan ekspor komoditas utama, tingkat kemiskinan cenderung meningkat. Sebaliknya, semakin tinggi CPI dan pertumbuhan PDB, tingkat kemiskinan cenderung menurun. Hasil regresi menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan, bahwa kenaikan rasio utang dan ekspor komoditas utama justru berkorelasi positif dengan meningkatnya tingkat kemiskinan, sementara hanya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan pertumbuhan PDB yang sedikit menurunkannya. Secara khusus, temuan bahwa ekspor komoditas utama mendorong kenaikan kemiskinan menunjukkan paradoks mendasar dalam model pembangunan Indonesia yang menggantungkan diri pada ekspor batubara, sawit, dan nikel mentah, tanpa

mendorong industrialisasi atau distribusi nilai tambah di dalam negeri. Dengan koefisien tertinggi (1,73), variabel ini menjadi bukti paling kuat bahwa struktur ekonomi ekstraktif justru meminggirkan rakyat, memperkuat kelas elit, dan menjebak Indonesia dalam pola unequal exchange.

Sementara itu, korelasi positif antara utang dan kemiskinan memperlihatkan bahwa utang publik bukan digunakan sebagai instrumen pembangunan berbasis kesejahteraan, melainkan sebagai alat pembiayaan proyek-proyek simbolik yang gagal menyasar kelompok rentan. Dalam kondisi ini, pertumbuhan ekonomi pun kehilangan daya dorong transformatifnya, meskipun secara teoritis pertumbuhan PDB menurunkan kemiskinan, koefisien yang relatif kecil (−0,614) menandakan bahwa pertumbuhan di Indonesia tidak inklusif dan tidak merata. Akhirnya, hanya IPK yang menunjukkan arah yang tepat, semakin rendah persepsi terhadap korupsi, semakin rendah pula kemiskinan, sebuah konfirmasi bahwa tata kelola yang bersih adalah prasyarat utama pembangunan yang adil. Singkatnya, model regresi ini secara kuantitatif menegaskan apa yang telah dibuktikan secara struktural: bahwa negara gagal menjalankan fungsi redistributif, protektif, dan produktifnya secara efektif. Negara tetap tumbuh, tetapi bukan untuk rakyatnya. (Casier & Beaton, 2015; Lim, 2023).

Seluruh pembacaan, baik kualitatif maupun kuantitatif, mengarah pada satu simpulan fundamental: bahwa Indonesia bukan semata-mata menghadapi krisis kemiskinan, tetapi krisis fungsi negara. Ketika kebijakan fiskal melayani kepentingan modal, bukan rakyat; ketika pekerja informal yang menopang mayoritas tenaga kerja justru dibiarkan tanpa perlindungan; ketika utang dan investasi asing dijadikan pilar pembangunan tanpa kontrol kedaulatan; dan ketika ekspor komoditas hanya memperkaya elit ekstraktif tanpa menyejahterakan buruh dan petani, maka negara telah menjauh dari watak konstitusionalnya. Model regresi mempertegas bahwa fondasi kebijakan pembangunan Indonesia berdiri di atas kontradiksi: utang menambah kemiskinan, ekspor memperdalam ketimpangan, dan pertumbuhan tak mampu membebaskan.

Dalam kerangka pembangunan yang demikian, kita tidak hanya menyaksikan kegagalan teknokratis, tetapi kegagalan historis dalam membangun negara yang adil dan berdaulat. Indonesia hari ini bukan *failed state* dalam pengertian institusi yang runtuh, tetapi *failing state*, sebuah negara yang berjalan, tetapi kehilangan arah, makna, dan komitmen terhadap rakyatnya. Dan

jika struktur ini terus dibiarkan, maka kegagalan itu hanya tinggal menunggu waktu.

C. Negara Pemburu Rente

Istilah *rentier state* merujuk pada konsep yang diperkenalkan oleh Hazem Beblawi dan Giacomo Luciani (1987), yang menggambarkan negara yang memperoleh sebagian besar pendapatannya dari rente atau sewa ekonomi eksternal, seperti ekspor minyak dan gas, alih-alih dari aktivitas produktif domestik seperti pajak. Negara jenis ini umumnya memiliki karakteristik seperti lemahnya basis pajak, dominasi elit dalam distribusi rente, minimnya akuntabilitas publik, serta kecenderungan otoritarianisme yang terselubung.

Indonesia saat ini tengah menunjukkan gejala struktural sebagai negara rente, ditandai oleh ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pendapatan dari sektor ekstraktif. Ketergantungan ini bukan hanya mencerminkan kegagalan dalam mendiversifikasi ekonomi, tetapi juga menunjukkan terbentuknya relasi kuasa yang eksploitatif dan elitis dalam pengelolaan kekayaan negara. Penerimaan non-pajak dari ekstraksi sumber daya seperti minyak, gas, batu bara, dan kelapa sawit semakin mendominasi struktur pendapatan negara. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2023) menunjukkan bahwa kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas sebesar Rp 117,0 triliun, atau 39% dari total PNBP sektor ESDM. Sedangkan PNBP sektor minerba mencapai Rp 173,0 triliun, atau 58% dari total PNBP sektor ESDM. Bahkan, dalam laporan APBN 2023 oleh Kementerian Keuangan, sekitar 13% dari total pendapatan negara berasal dari PNBP sumber daya alam, angka yang mencerminkan ketergantungan serius terhadap sektor yang tidak berkelanjutan.

Namun, data realisasi tahun 2024 menunjukkan kontraksi signifikan. Total penerimaan negara dari sumber daya alam menyusut menjadi hanya Rp269,6 triliun. Penurunan ini dipicu oleh melemahnya harga komoditas global, penurunan *lifting* minyak dan gas[6], serta turunnya volume produksi minerba (Bisnis.com, 2024). Situasi ini mengungkap betapa rentannya struktur fiskal Indonesia terhadap dinamika eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Hal ini mengancam kapasitas belanja negara untuk program sosial dan infrastruktur jangka pendek, serta mempersempit ruang fiskal untuk antisipasi krisis. Bank Dunia (2023) juga mencatat

---

[6] Penurunan *lifting* minyak dan gas adalah istilah yang merujuk pada penurunan jumlah produksi minyak dan gas yang telah dijual dan didistribusikan, biasanya diukur berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN atau rencana kerja dan anggaran.

bahwa ekspor komoditas masih menjadi tumpuan utama neraca transaksi berjalan Indonesia, yang sangat sensitif terhadap gejolak eksternal.

Dominasi sektor ekstraktif menciptakan ketergantungan fiskal yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga global dan menghambat transformasi struktural menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Ketika sebagian besar penerimaan negara berasal dari sumber daya alam, negara kesulitan melakukan perencanaan jangka panjang dan pembangunan ekonomi bernilai tambah (Du et al., 2020). Alih-alih memperkuat daya saing dan mendorong transisi ekonomi, anggaran negara banyak digunakan untuk belanja konsumtif. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi energi tahun 2024 mencapai Rp177,62 triliun, 8,1% (yoy) lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya. Dengan rincian Rp 13,3 triliun untuk BBM dan LPG, serta Rp 73,6 triliun untuk subsidi listrik. Ini menunjukkan bahwa negara masih lebih memilih mempertahankan harga energi fosil ketimbang berinvestasi dalam energi terbarukan. Menurut International Energy Agency, Indonesia termasuk lima negara dengan subsidi energi fosil terbesar secara global. Subsidi ini juga tetap dipertahankan karena memiliki nilai politik yang tinggi, terutama dalam menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi masyarakat bawah.

Di tengah ketergantungan terhadap sektor ekstraktif, performa sektor pajak juga menunjukkan kelemahan yang signifikan. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 10,08%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rasio pajak tahun 2023 yang mencapai 10,31% PDB (Simanjuntak & Pratama, 2025). Ini menandakan tantangan serius dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain, Indonesia tertinggal jauh—Singapura (11,9%), Malaysia (12,4%), Laos (12,98%), Filipina (14,1%), dan Thailand (15,45%) (Sidqi, 2025). Fakta ini mengindikasikan bahwa sistem perpajakan nasional masih stagnan dan belum mampu mencerminkan prinsip keadilan. Kebijakan seperti *tax amnesty*[7] yang tidak diikuti reformasi struktural menjadikan basis pajak tetap sempit. Sementara UMKM

[7] *Tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan pengampunan atau penghapusan sanksi pajak bagi wajib pajak yang melaporkan dan membayar pajak terutang dalam periode tertentu. Program ini memberikan kesempatan satu kali kepada wajib pajak untuk melunasi pajak terutang beserta bunga atau denda yang lebih ringan, tanpa dikenai sanksi pidana atau perdata atas pelanggaran pajak sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki kepatuhan pajak, dan mendorong repatriasi aset ke dalam negeri (Direktorat Jenderal Pajak, tanpa tahun.).

dibebani PPh final 0,5%, perusahaan besar terus menikmati berbagai insentif fiskal[8]. Beban pajak pun menjadi regresif, dengan masyarakat menengah dan bawah menanggung lebih banyak melalui PPN. Ketimpangan fiskal ini turut memperburuk distribusi kesejahteraan, sebagaimana tercermin dari data rasio gini yang stagnan di angka 0,38–0,39 (BPS Indonesia, 2023; BPS Indonesia, 2024).

Alokasi anggaran untuk proyek-proyek strategis seperti pembangunan IKN yang menelan biaya lebih dari Rp460 triliun juga tidak menunjukkan korelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat akar rumput. Kajian dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pada 2023 menyatakan bahwa manfaat ekonomi proyek-proyek besar cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara ketimpangan regional tetap tinggi. Dalam publikasi "Kapasitas Fiskal dalam Menghadapi Dinamika Subsidi dan Kompensasi Energi", INDEF menyoroti alokasi fiskal nasional yang cenderung bias ke arah belanja politik dan subsidi energi, alih-alih pembangunan manusia dan pelayanan dasar.

Kritik publik terhadap proyek IKN, misalnya, menyebutkan bahwa pembangunan ini lebih merepresentasikan kepentingan elit ketimbang kebutuhan masyarakat luas. Hal ini mencerminkan pola klasik negara rente. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) tahun 2023 mencatat bahwa skor transparansi anggaran Indonesia stagnan di angka 70 dalam tiga edisi Open Budget Survey terakhir (2019, 2021, 2023). Minimnya keterbukaan terhadap dokumen anggaran seperti Rencana Kerja Pembangunan Daerah[9] memperbesar ruang bagi penyimpangan. Ketika akuntabilitas fiskal lemah, prinsip demokrasi fiskal tidak berjalan, dan negara menjadi entitas yang terpisah dari kepentingan warga. Kelompok rentan pun semakin termarjinalisasi karena tidak memiliki akses terhadap hasil pembangunan.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, relasi antara negara dan korporasi besar juga memperlihatkan pola kolusi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (2023), melaporkan peningkatan konflik agraria dan kerusakan ekologis yang melibatkan perusahaan pertambangan dan perkebunan besar, dengan

---

[8] Insentif fiskal bagi perusahaan adalah bantuan atau kemudahan finansial yang diberikan pemerintah kepada perusahaan untuk mendorong aktivitas ekonomi dan investasi. Bantuan ini biasanya berupa keringanan pajak, pembebasan bea masuk, atau dukungan keuangan lainnya.

[9] Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yaitu dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk periode satu tahun. RKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah tersebut. RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan, serta menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

sedikitnya 162 konflik agraria sepanjang tahun. Contohnya dapat dilihat pada konflik agraria di Rempang dan Wadas. Negara sering kali gagal menjadi penengah, bahkan bertindak sebagai pelindung kepentingan korporasi. Dalam situasi ini, negara tidak lagi menjadi penjamin keadilan ekologis, melainkan aktor yang memperkuat dominasi modal.

Jika terus dibiarkan, Indonesia berisiko semakin dalam terjebak dalam logika negara rente yang tidak mengandalkan produktivitas. Negara kehilangan otonomi fiskal dan menjadi alat distribusi rente untuk elit. Legitimasi negara tidak lagi dibangun dari kontrak sosial, melainkan dari relasi transaksional dengan kelompok dominan. Seperti yang ditegaskan oleh Terry Lynn Karl (1997), kekayaan sumber daya tanpa tata kelola demokratis justru memperlemah institusi dan memperkuat otoritarianisme terselubung. Bila gejala struktural ini tak dikoreksi, maka negara akan semakin menjauh dari fungsi kesejahteraan sosialnya. Rente menggantikan produktivitas, dan elit mengambil alih ruang fiskal tanpa akuntabilitas. Risiko politisasi anggaran, korupsi, dan eksklusi sosial akan terus mereproduksi ketimpangan dan memperlemah kapasitas negara dalam jangka panjang.

E. Penutup

Dalam menatap cita-cita "Indonesia Emas 2045", bangsa ini dihadapkan pada paradoks mendalam antara optimisme pembangunan dan realitas struktural yang ada. Dengan realitas ini kita dapat mengetahui bahwa di balik pertumbuhan ekonomi yang stabil secara agregat, tersembunyi ketimpangan distribusi kesejahteraan, pelemahan kapasitas fiskal, dan menurunnya kredibilitas institusi negara. Ketimpangan antara optimisme dan realitas ini menunjukkan bahwa visi pembangunan nasional belum sepenuhnya berpijak pada fondasi keberlanjutan sosial dan ekonomi.

Realitas tentang sektor informal, stagnasi upah rill, serta lemahnya hukum, merupakan indikator bahwa negara telah bergeser dari fungsinya sebagai pelindung warga menuju ke peran formalitas yang hanya menjamin stabilitas birokratik. Dengan demikian, tantangan besar Indonesia bukan sekedar soal pertumbuhan atau investasi, tetapi menyangkut bagaimana negara ini memahami dirinya sendiri. Disinilah Indonesia membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya adaptif, tetapi juga reflektif terhadap karakter dan kebutuhan domestiknya.

Pembangunan endogen hadir, bukan sekadar sebagai model alternatif, melainkan sebagai tawaran konseptual dan praktikal untuk keluar dari jebakan struktural yang menjerat negara berkembang, khususnya negara yang rentan

menjadi *rentier state* dan *failed state*. Secara konseptual, pendekatan pembangunan endogen menolak logika pembangunan eksogen yang menitikberatkan pada imitasi terhadap model Barat, ketergantungan pada bantuan luar negeri, dan orientasi pada pertumbuhan makroekonomi yang semu. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya *self-reliance*, *contextual innovation*, dan *institutional deepening*, yaitu penguatan kapasitas negara dan masyarakat sipil dalam menciptakan solusi berbasis kekuatan lokal (Boons & Edler, 2018; Friedmann, 1992). Hal ini menjadikannya sebagai kerangka pembangunan yang holistik, bukan hanya soal pertumbuhan, tetapi tentang proses mengakar dari dalam, yang menjunjung martabat, kemandirian, dan keberlanjutan (Ray, 1999; Roep, 2000).

Dalam konteks negara *rentier*, seperti yang dipotret Beblawi & Luciani (1987), negara hanya berperan sebagai penyalur rente dari sumber daya, bukan produsen nilai. Pembangunan endogen menolak posisi pasif ini dengan menekankan *value creation*[10] melalui hilirisasi industri, riset domestik, dan redistribusi produktif. Ketika sumber daya tidak diolah oleh kemampuan dalam negeri, maka yang terjadi bukanlah pembangunan, tetapi ekstraksi. Oleh karena itu, endogenitas menjadi syarat mutlak untuk mengubah ekonomi berbasis rente menjadi ekonomi berbasis kapasitas.

Sementara itu, pada konteks *failed state*, pembangunan endogen memberikan harapan rekonstruksi dari dalam. Negara yang gagal, menurut Rotberg (2004), adalah negara yang kehilangan fungsi dasar: dari pelayanan publik, penyusunan anggaran yang berpihak, hingga legitimasi rakyat. Pembangunan yang mengakar dari kekuatan komunitas lokal, serta didukung oleh reformasi kelembagaan yang akuntabel dan partisipatif, menjadi penangkal logis atas gejala kegagalan ini. Endogenitas tidak hanya berbicara tentang ekonomi, tetapi juga mengenai kedaulatan politik dan sosial bahwa pembangunan sejati dimulai dari kemampuan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, melalui negara yang mampu mendengar dan bertindak.

Lebih dari sekadar metode teknis, pendekatan endogen juga merupakan *paradigma etis*[11]. Ia mengembalikan posisi manusia sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek statistik. Ia menjembatani antara modernisasi dan tradisi, antara globalisasi dan kearifan lokal, melalui dialektika yang kontekstual dan tidak dogmatis (Goulet, 1995). Dengan kata lain, menurut Bhaskar (1978), pembangunan

---

[10] *Value creation* dalam konteks ekonomi berarti menciptakan nilai melalui aktivitas produksi dan inovasi yang meningkatkan daya saing dan tidak semata bergantung pada sumber daya alam.

[11] Pembangunan bukan hanya proses teknis, tetapi juga etis: harus menjunjung martabat manusia, keadilan, dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.

endogen adalah bentuk *critical realism*[12] dalam kebijakan publik, ia menolak utopia pasar bebas, namun juga tidak terjebak dalam proteksionisme reaksioner[13] (Rodrik, 2011).

Dalam pendekatan endogen, pembangunan bukan semata tentang menaikkan angka PDB atau menstabilkan neraca perdagangan, melainkan tentang memperkuat kemampuan bangsa untuk mengelola sumber dayanya secara berdaulat dan berkelanjutan. Endogenitas adalah tentang membangun *capacity to choose*, yaitu kemampuan suatu negara dan rakyatnya untuk menentukan masa depannya tanpa dikendalikan oleh kepentingan asing atau tekanan jangka pendek pasar global (Sen, 1999).

Pendekatan ini, ketika diintegrasikan secara konsisten dalam kebijakan publik, akan menciptakan sistem pembangunan yang lebih resilien. Ketahanan bukan lagi dimaknai sebagai kemampuan bertahan dari krisis, tetapi sebagai kemampuan untuk terus tumbuh dalam kompleksitas (Boons & Edler, 2018). Ini adalah pembangunan yang tidak panik menghadapi perubahan global, karena ia tahu dirinya sendiri. Ia berdiri kokoh karena akarnya kuat, bukan karena topengnya gemerlap. Pada akhirnya, pembangunan endogen mengingatkan kita bahwa transformasi sejati tidak dimulai dari statistik yang melonjak, melainkan dari keputusan-keputusan kecil yang berpihak pada kepentingan bersama. Dari keberanian untuk membiayai riset lokal daripada studi konsultasi asing (Sachs, 2005). Dari komitmen untuk membeli produk UMKM, bukan barang impor mewah. Dari kejujuran dalam menyusun anggaran, bukan dari skenario indah yang disusun untuk presentasi elit. Ini bukan soal romantisme kemandirian, tetapi tentang logika pembangunan yang jujur terhadap konteksnya (Friedmann, 1992; Pieterse, 2000).

Namun di tengah kerapuhan ini, pendekatan pembangunan endogen memberikan harapan. Ia menolak logika eksogen yang meniru Barat atau tunduk pada modal asing. Ia menekankan pentingnya *self-reliance*, inovasi kontekstual, dan penguatan institusi lokal. Pembangunan endogen menjadikan manusia sebagai subjek, bukan objek. Ia menolak pertumbuhan semu dan menggantinya dengan pembangunan yang berakar dari kekuatan lokal.

---

[12] *Critical realism* adalah pendekatan filsafat ilmu yang mengakui adanya realitas objektif, tetapi menekankan bahwa pemahaman terhadap dunia sosial harus memperhatikan struktur, agensi, dan konteks historis.

[13] Rodrik memperingatkan bahwa resistensi terhadap globalisasi bisa berubah menjadi proteksionisme yang tidak produktif, jika tidak disertai dengan alternatif kebijakan ekonomi nasional yang inklusif dan strategis.

Dalam kerangka endogen, ekonomi berbasis rente digantikan oleh ekonomi berbasis kapasitas. Negara tidak lagi menjadi pelayan rente, tetapi agen nilai. Inspirasi dari Korea Selatan dan Finlandia menunjukkan bahwa dengan investasi pada pendidikan, riset, dan inklusi sosial, negara bisa keluar dari jebakan struktural (Jaramillo, 2009; Ministry of Education and Culture Finland, 2019). Hanya dibutuhkan kemauan politik untuk membangun dari dalam dan keberanian moral untuk meninggalkan logika ekstraktif dan populisme semu (Sachs, 2005; Booth, 1994).

Indonesia tidak kehabisan sumber daya, yang krisis adalah visi dan keberpihakan. Maka, pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal kemampuan teknis, tetapi kemauan politik. Apakah kita akan terus membangun monumen demi elit, atau mulai membangun kehidupan bagi rakyat? Karena pada akhirnya, negara yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling tahu siapa dirinya dan untuk siapa ia berdiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu, A., & Imansyah, M. H. (2023). The impact of fuel subsidy to the income distribution: The case of Indonesia. *International Trade and Economic Review*, 8(3), Article 932. https://doi.org/10.33105/itrev.v8i3.932

Ablaza, C., Alladi, V., & Pape, U. (2023, November). *Indonesia's informal economy: Measurement, evidence, and a research agenda* (Policy Research Working Paper 10608). Poverty and Equity Global Practice. https://espace.library.uq.edu.au/data/UQ_e695109/WBPRWP.pdf?dsi_version=f32b8f09134881b0c9b36919af63cf24&Expires=1746155797&Key-Pair-Id=APKAJKNBJ4MJBJNC6NLQ&Signature=AfVAK56~LVh73T38qRt-V7ECnLFCx1uwWLKWeUzF1wEfV~5bb7p20xmOiVjRWF72oeNi~1xM9Mt6kMwhnFTXmejrcidm6ZNaq~sxhmV8j1CpemXCUBkEy24bqOFg0Va6zrbQugRyFSQmMnk6vrCk-izReC1u4ZBNK~yWkpZlmFoxo95hOYR3wZl1bzsF1EA6R7DUGn4T0GgkrLUxQSd6SigdyhiBesF6lR-~Z2kFOPpKUcHkvtVUjOVZe3C0sL8IFrIB~0wi9FyfXXIKSJL71Z~pHUx3CGb-ZCI-HzcJBLiB1VJRQE8e2YIkqhFJnpofrOHjgOvWTlNoNFM1-MaFfw__

Akhmad, A., Asse, A., Nursalam, N., Ibrahim, I., Bunyamin, B., Anssar, A., & Sahajuddin, S. (2023). The impact of the increase of oil fuel price and government subsidy on Indonesia's economic performance. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(6), 547–557. https://doi.org/10.32479/ijeep.15033

Al Izzati, Ridho, Asri Yusrina, and Asep Suryahadi (2023) 'Estimating the Effect of a Fuel Price Increase on Poverty and Inequality: Evidence from a Fuel Subsidy Reduction in Indonesia.' Research Note No. 1. Jakarta: The SMERU Research Institute https://smeru.or.id/en/publication/estimating-effect-fuel-price-increase-poverty-and-inequality-evidence-fuel-subsidy

Anggela, N. L., & Dewi, F. S. (2025, April 21). BPS: Ekspor CPO dan Batu Bara Merosot pada Maret 2025. *Bisnis.Com*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250421/12/1870550/bps-ekspor-cpo-dan-batu-bara-merosot-pada-maret-2025

ARC Group. (2025, March 18). *Investment Outlook, Indonesia 2024 - ARC Group*. ARC Group - Global Financial Services With Deep Roots in Asia. https://arc-group.com/report/investment-outlook-indonesia-2024/

Badan Pusat Statistik. (tanpa tahun.). Ekspor Desember 2023 mencapai US$22,41 miliar, naik 1,89 persen dibanding November 2023 dan Impor Desember 2023 senilai US$19,11 miliar, turun 2,45 persen dibanding November 2023. Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/01/15/2298/ekspor-desember-2023-mencapai-us-22-41-miliar--naik-1-89-persen-dibanding-november-2023-dan-impor-desember-2023-senilai-us-19-11-miliar--turun-2-45-persen-dibanding-november-2023.html

Badan Pusat Statistik (BPS) (2023, July 17). *Gini Ratio Maret 2023 tercatat sebesar* 0,388. Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2035/gini-ratio-maret-2023-tercatat-sebesar-0-388-.html

Banerjee, A., Finkelstein, A., Hanna, R., Olken, B., Ornaghi, A., & Sumarto, S. (2017). *Enrolling informal sector workers in national health insurance in Indonesia*. J-PAL Southeast Asia. https://www.povertyactionlab.org/evaluation/enrolling-informal-sector-workers-national-health-insurance-indonesia

Beblawi, H., & Luciani, G. (1987). *The Rentier State*. Croom Helm.

Bhaskar, R. (1978). A *realist theory of science*. Harvester Press.

Boons, F., & Edler, J. (2018). *Demand, innovation, and sustainability: Making sense of the missing link*. Technological Forecasting and Social Change, 139, 204–212. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.10.002

Booth, D. (1994). *Rethinking social development: Theory, research and practice*. Longman.

BPS Indonesia. (2023). *The Gini Ratio in March 2023 was* 0.388. BPS-Statistics Indonesia. https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2023/07/17/2035/gini-ratio-in-march-2023-was-0-388-.html

BPS Indonesia. (2024). *The Gini Ratio in September 2024 was* 0.381. BPS-Statistics Indonesia. https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2025/01/15/2399/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-381.html

BPS Indonesia. (tanpa tahun.). *Laju Pertumbuhan PDB industri manufaktur - Tabel statistik*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Retrieved April 29, 2025, from https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIxNiMy/laju-pertumbuhan-pdb-industri-manufaktur.html

Brooks, R. E. (2005). Failed States, or the State as Failure? *The University of Chicago Law Review*, 72(4), 1159–1196. http://www.jstor.org/stable/4495527

Bukamata News. (2025, Maret 20). *Gejolak pasar modal Indonesia: IHSG anjlok, investor asing tarik dana*. Bukamata News. https://bukamatanews.id/read/2025/03/20/gejolak-pasar-modal-indonesia-ihsg-anjlok-investor-asing-tarik-dana

Casier, L. & Beaton, C. (2015). Fossil-fuel Subsidy Reform and Higher Fuel Prices in Indonesia: Impacts and expectations. The International Institute for Sustainable Development. *iisd.org/gsi Issue Brief*. https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_indonesia_briefing_impacts_eng.pdf

Castells, M., & Himanen, P. (2002). *The information society and the welfare state: The Finnish model*. Oxford University Press.

Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.

Chomsky, N. (2006). *Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy*. Metropolitan Books.

CNN. (2025, February 11). Indeks Persepsi Korupsi RI 2024: Skor 37, Ranking 99 dari 180 Negara. Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250211131830-12-1196957/indeks-persepsi-korupsi-ri-2024-skor-37-ranking-99-dari-180-negara

DDTCNews. (2025, Maret 13). *Mengapa laporan APBN KiTa tak kunjung rilis? Ini alasan Sri Mulyani*. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809419/mengapa-laporan-apbn-kita-tak-kunjung-rilis-ini-alasan-sri-mulyani

DEEMING C. Guy Standing (2011), The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic. £19.99, pp. 198, pbk. *Journal of Social Policy*. 2013;42(2):416-418. doi:10.1017/S0047279412000876

Di John, J. (2008). *Conceptualising the Causes and Consequences of Failed States: A Critical Review of the Literature*. London:LSE Crisis States Research Centre.

Direktorat Jenderal Pajak. (tanpa tahun.). *Amnesti Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved May 1, 2025, from https://pajak.go.id/en/node/18464

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, Maret 24). IHSG Melemah, Penerimaan Pajak Ikut Lesu. Direktorat Jenderal Pajak. https://www.pajak.go.id/id/artikel/ihsg-melemah-penerimaan-pajak-ikut-lesu

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, Maret 24). Dampak Penurunan IHSG terhadap Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta6/id/data-publikasi/berita-terbaru/2912-dampak-penurunan-ihsg-terhadap-pendapatan-dan-pengeluaran-pemerintah.html

Du, J., Zhang, J., & Li, X. (2020). What is the mechanism of resource dependence and high-quality economic development? An empirical test from china. *Sustainability*, 12(19), 8144. https://doi.org/10.3390/su12198144

Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B. (2013). Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. *Review of Economics and Statistics*, 95(3), 776–797. https://doi.org/10.1162/rest_a_00300

Escobar, A. (1995). *Encountering development: The making and unmaking of the Third World*. Princeton University Press.

Estherina, I., & gandhi, G. (tanpa tahun.). Respons Ekonom soal Keterlambatan Rilis APBN KiTa: Kurangnya Transparansi Bisa Berdampak Serius. *Tempo*. Retrieved April 29, 2025, from https://www.tempo.co/ekonomi/respons-ekonom-soal-keterlambatan-rilis-apbn-kita-kurangnya-transparansi-bisa-berdampak-serius-1216525

Evans, S. D., & Prilleltensky, I. (2007). Youth and democracy: Participation for personal, relational, and collective well-being. *Journal of Community Psychology*, 35(6), 681–692. https://doi.org/10.1002/jcop.20172

FITRA, P. W. (2023). *Open budget survey 2023 – seknas FITRA*. https://seknasfitra.org/open-budget-survey-2023/

Florentin, V., & Utama, P. (tanpa tahun.). Dampak pelemahan industri manufaktur. *Tempo*. Retrieved April 29, 2025, from https://www.tempo.co/ekonomi/dampak-pelemahan-industri-manufaktur-407920/

Foreign direct investment (FDI) in Indonesia - Stanbic Bank TradeClub. (2025). https://www.tradeclub.stanbicbank.com/portal/en/market-potential/indonesia/investment#

Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell.

Goulet, D. (1995). *Development ethics: A guide to theory and practice*. Apex Press.

Hapsari, I. M., Yu, S., Pape, U. J., Mansour, W., & Macroeconomics, Trade and Investment Global Practice. (2023). Informality in Indonesia: levels, trends, and features. In World Bank, *Policy Research Working Paper* (No. 10586).

Hayami, Y., & Godo, Y. (2005). *Development Economics*. New York: Oxford University Press;

Hayami, Y. & Godo, Y. (2005). *Development Economics*; Streeten, P. (1981). *First Things First*.

Hoesein, Z. A. H. (tanpa tahun.). Kekuasaan Dan Korupsi Di Indonesia. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3304502&val=28981&title=KEKUASAAN+DAN+KORUPSI+DI+INDONESIA

ILO | Social Protection Platform. (tanpa tahun.). https://www.social-protection.org/gimi/ShowCountryProfile.action?iso=ID&

Indonesia economic update report, Q4 2024 - ARC Group. (2025, March 20). ARC Group - Global Financial Services with Deep Roots in Asia. https://arc-group.com/report/indonesia-economic-update-report-q4-2024/

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). (2023, May 2). *Kapasitas Fiskal dalam Menghadapi Dinamika Subsidi dan Kompensasi Energi*. Indef; INDEF. https://indef.or.id/publikasi/kapasitas-fiskal-dalam-menghadapi-dinamika-subsidi-dan-kompensasi-energi/

International Energy Agency (IEA). (tanpa tahun.). *Fossil Fuel Subsidies Database - Data product*. IEA. Retrieved April 30, 2025, from https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/fossil-fuel-subsidies-database

International Monetary Fund. (2002). *The Growth of the Underground Economy*. IMF Economic Issues, No. 30. https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/

International Monetary Fund. (2023, June 25). *Indonesia: 2023 article IV consultation-press release; staff report; and statement by the executive director for Indonesia*. IMF. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/06/22/Indonesia-2023-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-535060

Jakarta Globe. (tanpa tahun.). Indonesia sets $294.5 Billion export target for 2025. Jakarta Globe. Retrieved May 4, 2025, from https://jakartaglobe.id/business/indonesia-sets-2945-billion-export-target-for-2025

Jaramillo, M. (2009). *Endogenous Development and State Capacity: Lessons from East Asia*. Columbia University.

Kamalina, A. R. (2025, Maret 13). Postur lengkap APBN Februari 2025: Pajak anjlok, belanja lebih hemat. *Bisnis.com*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250313/10/1861002/postur-lengkap-apbn-februari-2025-pajak-anjlok-belanja-lebih-hemat

Karl, T. L. (1997). *The paradox of plenty: Oil booms and petro-states*. Univ of California Press.

Karyza, D. (2022, April 6). Govt cuts fertilizer subsidies, rolls out wage subsidies. *The Jakarta Post*. https://www.thejakartapost.com/business/2022/04/06/govt-cuts-fertilizer-subsidies-rolls-out-wage-subsidies.html

Kemenkeu. (tanpa tahun.). *Masyarakat Pun Menikmati APBN: Belanja Subsidi Energi Tahun 2024 Capai Rp169,5 triliun*. Retrieved April 30, 2025, from https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/masyarakat-pun-menikmati-apbn:-belanja-subsidi-energi-tahun-2024-capai-rp169,5-triliun

Kementerian ESDM. (tanpa tahun.). *Tembus Rp300,3 Triliun, PNBP Sektor ESDM di 2023 Lampaui Target*. ESDM. Retrieved April 30, 2025, from https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tembus-rp3003-triliun-pnbp-sektor-esdm-di-2023-lampaui-target

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN KiTa Edisi Februari 2025* [PDF]. https://archive.org/details/apbn-ki-ta-edisi-februari-2025/mode/2up

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (tanpa tahun.). Retrieved April 29, 2025, from https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Kinerja Ekspor Indonesia 2021 Tertinggi Dalam Satu Dekade Terakhir – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. (tanpa tahun.). https://feb.ui.ac.id/2022/01/21/kinerja-ekspor-indonesia-2021-tertinggi-dalam-satu-dekade-terakhir/

KumparanBISNIS. (2025, Maret 14). *APBN tekor Rp 31,2 triliun, penerimaan pajak anjlok 30,19% per Februari 2025*. Kumparan.

https://kumparan.com/kumparanbisnis/apbn-tekor-rp-31-2-triliun-penerimaan-pajak-anjlok-30-19-per-februari-2025-24fzdlTl76W/full

Lewis, W. A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. Manchester School, 22(2), 139–191. https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x

Lim, J. (2023, February 9). Indonesia's inflation lower than expected in 2022 despite cut in fuel subsidies. *The Business Times*. https://www.businesstimes.com.sg/international/asean/indonesias-inflation-lower-expected-2022-despite-cut-fuel-subsidies

Medcom.id. (2023). Visi dan misi Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka [PDF]. https://va.medcom.id/2023/pemilu/others/PRABOWOGIBRAN_VISI_MISI.pdf

Ministry of Education and Culture Finland. (2019). *Education policy in Finland: A way toward sustainable development*.

Mulya, A. (2024, August 11). Indonesia's biggest export: Top products and commodities. Blog - InvestinAsia. https://investinasia.id/blog/indonesia-biggest-export/

Mulya, A. (2024, October 31). *Basic salary and average salary in Indonesia: 2023 data*. Blog - InvestinAsia. https://investinasia.id/blog/salary-in-indonesia

Nurdifa, A. R., & Meilanova, D. R. (2025, February 4). Penerimaan Negara dari Batu Bara, Migas, dkk Susut jadi Rp269,6 Triliun di 2024. *Bisnis.Com*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250204/44/1836564/penerimaan-negara-dari-batu-bara-migas-dkk-susut-jadi-rp2696-triliun-di-2024

Okezone. (2014, July 13). 10 Komoditas ekspor Selama november 2020 0 : Foto okezone infografis. Https://Infografis.Okezone.Com/. https://infografis.okezone.com/detail/770474/10-komoditas-ekspor-selama-november-2020

Pieterse, J. N. (2000). After post-development. *Third World Quarterly*, 21(2), 175–191.

Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.

Presiden Republik Indonesia. (2025, Januari 22). *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025

Rafsanjani, K., & Rosdiana, N. (2025, Maret 23). *IHSG anjlok 19,49% dalam 5 bulan, sejak Prabowo-Gibran dilantik*. IDNFinancials. https://www.idnfinancials.com/id/news/53355/ihsg-anjlok-19-49-dalam-5-bulan-sejak-prabowo-gibran-dilantik

Ray, C. (1999). *Endogenous development in the era of reflexive modernity*. Journal of Rural Studies, 15(3), 257–267.

Reuters. (2025, February 18). Indonesia budget efficiency cuts remain at $18.8 bln, finance ministry says. *Reuters*. https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-budget-efficiency-cuts-remain-188-bln-finance-ministry-says-2025-02-18/

Rinaldi, R. (2025). *World Bank highlights Indonesia's low tax revenue*. https://indonesiabusinesspost.com/. https://indonesiabusinesspost.com/4015/policy-and-governance/world-bank-highlights-indonesias-low-tax-revenue

Rodríguez-Pose, A. (2013). *Do institutions matter for regional development?* Regional Studies, 47(7), 1034–1047. https://doi.org/10.1080/00343404.2012.748978

Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W. W. Norton & Company.

Roep, D. (2000). *Innovating production and marketing in agriculture: A socio-technical study of endogenous development processes in Dutch horticulture*. PhD Thesis, Wageningen University.

Rotberg, R. I. (2003). *Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators*. In R. I. Rotberg (Ed.), State Failure and State Weakness in a Time of Terror (pp. 1-25). Brookings Institution Press.

Rotberg, R. I. (2003). *State failure and state weakness in a time of terror* (p. 4). Brookings Institution Press.

Rotberg, R. I. (2004). *When states fail: Causes and consequences*. Princeton University Press.

Sachs, J. (2005). *The End of Poverty*. New York: Penguin.

Sachs, J. D. (2005). *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. Penguin Press.

Sachs, W. (Ed.). (1992). *The development dictionary: A guide to knowledge as power*. Zed Books.

Saptamaji, R. (2011). Indonesia: Jalan Menuju Negara Gagal [PDF]. Academia.edu. https://www.academia.edu/1185151/Indonesia_Jalan_Menuju_Negara_Gagal

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
Setiyadi, D. (2018, November 27). Top 10 Indonesia export commodities: Insights before you invest. InCorp Indonesia. https://www.cekindo.com/blog/top-10-export-commodities-indonesia
Sidqi, M. A. (2025, January 2). Cek data: Apakah Kenaikan PPN mampu dongkrak rasio pajak? *Katadata.Co.Id*. https://katadata.co.id/cek-data/677644582c673/cek-data-apakah-kenaikan-ppn-mampu-dongkrak-rasio-pajak
Silfia, I. (2025, Maret 13). APBN Februari 2025 defisit Rp31,2 triliun. ANTARA *News*. https://www.antaranews.com/berita/4708093/apbn-februari-2025-defisit-rp312-triliun
Simanjuntak, S. D. A., & Pratama, W. P. (2025, February 6). Rasio Pajak 2024 Turun jadi 10,08%. *Bisnis.Com*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250206/259/1837392/rasio-pajak-2024-turun-jadi-1008
Siswanto, D. (2025, Maret 7). Keterlambatan Rilis APBNKiTa Januari 2025, Ada Apa dengan Keuangan Negara? Kontan Nasional. https://nasional.kontan.co.id/news/keterlambatan-rilis-apbnkita-januari-2025-ada-apa-dengan-keuangan-negara
Siswanto, H. (2015). Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengefektifkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/584/523/1873
Statista. (2024, October 30). *Average monthly net wage of employees Indonesia* 2013-2024. https://www.statista.com/statistics/1065801/indonesia-average-monthly-net-wage-of-employees
Tampubolon, H. D. (2012, September 28). OECD deems Indonesian tax incentives too generous. *The Jakarta* Post. https://www.thejakartapost.com/news/2012/09/28/oecd-deems-indonesian-tax-incentives-too-generous.html
Tempo.co. (2025, Maret 13). *Alasan Sri Mulyani telat umumkan* APBN KiTa: *Datanya belum stabil*. Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-sri-mulyani-telat-umumkan-apbn-kita-datanya-belum-stabil--1219049
Tempo.co. (2025, Maret 13). *Alasan Sri Mulyani telat umumkan* APBN KiTa: *Datanya belum stabil*. Tempo.

https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-sri-mulyani-telat-umumkan-apbn-kita-datanya-belum-stabil--1219049
Thurer, D. (1999). *The "Failed State" and International Law*. International Review of the Red Cross, 81(836), 731-761. International Committee of the Red Cross.
TradeImeX. (2024, August 2). What are top 10 Indonesia's Exports in 2023. Infinite. https://www.tradeimex.in/blogs/top-Indonesia-exports
TRADING ECONOMICS. (tanpa tahun.). *Indonesia - Tax revenue (% of GDP) - 2025 Data 2026 Forecast 1972-2022 historical*. https://tradingeconomics.com/indonesia/tax-revenue-percent-of-gdp-wb-data.html
Transparency International. (2025, February 6). *Corruption perceptions index 2024 - Publications*. Transparency.Org. https://www.transparency.org/en/publications/corruption-perceptions-index-2024
TrendEconomy. (2024, Januari 28). *Indonesia | Imports and Exports | World |* ALL COMMODITIES | *Value* (US$) *and Value Growth*, YoY (%) | 2002 - 2023. https://trendeconomy.com/data/h2/Indonesia/TOTAL
United Nations Development Programme. (tanpa tahun.). 2022 *annual report*, A *snapshot of key progress and achievements in Indonesia*. UNDP. Retrieved April 29, 2025, from https://www.undp.org/indonesia/publications/2022-annual-report-snapshot-key-progress-and-achievements-indonesia
Universitas Gadjah Mada. (2025, Maret 24). IHSG Anjlok, Ekonom UGM Sebut Sinyal Krisis Kepercayaan Pasar. UGM News. https://ugm.ac.id/id/berita/ihsg-anjlok-ekonom-ugm-sebut-sinyal-krisis-kepercayaan-pasar/
Urata, S., & Baek, Y. (2023). *Technology transfer and firm competitiveness: The case of Indonesia*. https://doi.org/10.56506/usny3110
Wade, R. (1990). *Governing the market: Economic theory and the role of government in East Asian industrialization*. Princeton University Press.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2023, June 12). *Tinjauan Lingkungan Hidup* 2023 *(Terdepan di luar Lintasan)*. WALHI. https://www.walhi.or.id/tinjauan-lingkungan-hidup-2023-terdepan-di-luar-lintasan
Wardhani, S. B., Cali, M., Azhar, S. A., Kamphuis, B., World Bank Group, & UK-FCDO. (2021). *Improving Business Environment for Prosperity: Reform Story*.

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/fb5ac586eeb2ad18456846807da7dfd6-0430012021/related/Opening-Indonesia-to-FDI-Final-WEB.pdf

Workman, D. (tanpa tahun.). Indonesia's top exports 2024. Worldstopexports. https://www.worldstopexports.com/indonesias-top-10-exports/

Worldbank. (tanpa tahun.). Indonesia trade. Text. Retrieved May 4, 2025, from https://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/en/IDN/textview

World Bank Group. (2025, April 15). *Indonesia economic prospects* (IEP). World Bank Group. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospect#2

World Bank Open Data. (2025). World Bank Open Data. https://data.worldbank.org/country/indonesia

Yanwardhana, E. (2022, September 15). Data terkini ekspor andalan RI: Besi & Baja, CPO & Batu Bara. Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220915153038-4-372433/data-terkini-ekspor-andalan-ri-besi-baja-cpo-batu-bara

Yaputra, H., Azzahra, N., Yusrial, M. R., Nefi, A., Putra, N., & Antara. (2025, Februari 17). Efisiensi Anggaran Akan Pengaruhi Pelayanan Publik di Beberapa Kementerian dan Lembaga. Tempo.co. https://www.tempo.co/politik/efisiensi-anggaran-akan-pengaruhi-pelayanan-publik-di-beberapa-kementerian-dan-lembaga-1208094

Yulian, E. (2022, January 17). Ekspor desember 2021 Turun, Ini Penjelasan BPS. Infobanknews. https://infobanknews.com/ekspor-desember-2021-turun-ini-penjelasan-bps/